

Perempuan Indonesia Dan Organisasi Fujinkai: Agensi Dan Resistensi Di Bawah Pendudukan Jepang (1942–1945)

Indonesian Women And The Fujinkai Organization: Agency And Resistance Under Japanese Occupation (1942-1945)

**Friska Fransiska Aruan, Salsabila Lubis, Kinanti Naya Natasha,
Gabriel Joey Febriand Sinurat, Sitevis Ndruru, Rosmaida
Sinaga**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Jl. William
Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Email: Friskaaruan2017@gmail.com,
salsakhairany332@gmail.com, kinantinayanatasha@gmail.com,
gabrielfebriand@gmail.com, sitevisndruru4@gmail.com,
rosmaidasinaga@unimed.ac.id

ABSTRACT

The "Common Prosperity of Greater East Asia" as a cover for imperialist expansion and exploitation of resources, especially oil, which were crucial for the Japanese war machine. The rapid invasion in early 1942, followed by the surrender of the Dutch in Kalijati, marked the beginning of a new chapter of colonialism. This study aims to determine various Japanese policies during its occupation of Indonesia and the various forms of resistance of the Indonesian people against Japan. The research method used in this study is the historical method with the stages of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Based on the results of the study, it is known that Japan implemented repressive policies in various fields: politics (banning of Dutch/English organizations and languages), economy (autarky system and romusha), social (people's suffering and jugun lanfu), and military (formation of Peta, Hizbullah, and other youth organizations). Although Japan tried to recruit support through propaganda and organizations such as the Three A Movement and PUTERA, their cruelty and oppression triggered various forms of popular resistance, both physical (armed rebellions such as PETA in Blitar and Laskar Hizbullah) and non-physical (sabotage and refusal to work). force).

Keywords: *Fujinkai, women, Japanese occupation, agency, resistance.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika organisasi Fujinkai yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia dan peran perempuan di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mobilisasi perang, sekaligus menelusuri ruang agensi dan resistensi yang dijalankan oleh perempuan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode kajian pustaka melalui analisis sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fujinkai merupakan alat propaganda kolonial yang bersifat koersif, perempuan Indonesia mampu memanfaatkan struktur organisasi tersebut untuk memperluas peran sosial, membentuk jaringan kolektif, dan memperoleh keterampilan baru. Keterlibatan mereka tidak hanya menunjukkan kepatuhan, tetapi juga strategi adaptasi, negosiasi kepentingan komunitas, dan pembentukan identitas baru di tengah represi kolonial. Setelah kemerdekaan, sebagian mantan anggota Fujinkai berhasil mentransformasi diri dan berkontribusi dalam gerakan perempuan nasional, meskipun tidak lepas dari stigma historis sebagai kolaborator Jepang. Temuan ini menekankan bahwa organisasi kolonial pun dapat menjadi arena taktis bagi kelompok subordinat untuk menciptakan perubahan sosial.

Kata kunci: *Fujinkai, perempuan, pendudukan Jepang, agensi, resistensi*

PENDAHULUAN

Pendudukan militer Jepang di Indonesia selama tahun 1942 hingga 1945 merupakan babak penting dalam sejarah bangsa yang membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, politik, dan gender masyarakat. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan Jepang adalah pembentukan organisasi perempuan bernama Fujinkai. Organisasi ini difungsikan sebagai alat mobilisasi untuk mendukung logistik perang, menyebarkan propaganda Kekaisaran Jepang, dan merangkul perempuan Indonesia ke dalam struktur kekuasaan yang diawasi ketat. Jepang tidak hanya memposisikan perempuan sebagai tenaga kerja domestik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang terorganisir dan hirarkis (Kratoska, 2005).

Fujinkai memiliki struktur yang ketat dan menyentuh lapisan perempuan dari berbagai latar belakang sosial. Meski secara resmi dijadikan alat propaganda kolonial, keterlibatan perempuan dalam organisasi ini justru membuka peluang baru dalam partisipasi publik. Perempuan Indonesia mulai berinteraksi dalam forum sosial, mengikuti pelatihan, serta berkontribusi dalam program sosial seperti penggalangan bahan pangan dan pelatihan keperawatan dasar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan agensi perempuan dalam organisasi yang awalnya bersifat koersif tersebut (Blackburn, 2004).

Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran dan struktur organisasi Fujinkai dibentuk oleh kepentingan kolonial Jepang serta sejauh mana perempuan Indonesia mampu membentuk peran sosial-politiknya di dalam organisasi tersebut. Kajian ini penting dilakukan mengingat keberadaan Fujinkai sering kali direduksi hanya sebagai alat pendudukan, tanpa melihat dinamika internal yang mencerminkan adanya ruang negosiasi, bahkan resistensi dalam batas-batas yang diizinkan. Dengan menelaah peran perempuan dalam Fujinkai, tulisan ini

berupaya mengisi kekosongan dalam historiografi yang cenderung maskulin dan tidak memberi ruang cukup bagi pengalaman perempuan selama masa penjajahan.

Penelitian ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa sejarah perempuan tidak hanya terbentuk dari narasi heroik atau emansipatoris yang eksplisit, tetapi juga dari praktik-praktik keseharian dalam ruang kolonial yang penuh keterbatasan. Dari dalam struktur yang dikendalikan, perempuan Indonesia membangun taktik bertahan, berjejaring, bahkan mengartikulasikan kepentingan kolektifnya secara strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan metode kajian pustaka (library research). Kajian ini berfokus pada analisis literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku sejarah, artikel penelitian, serta dokumen arsip yang berkaitan dengan organisasi Fujinkai dan peran perempuan Indonesia selama pendudukan Jepang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk memahami dinamika struktur dan fungsi Fujinkai sebagai alat mobilisasi kolonial serta potensi agensi perempuan di dalamnya.

Penulisan mengikuti tahapan metode sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2008), yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel, baik primer maupun sekunder. Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai keabsahan dan reliabilitas informasi melalui kritik internal dan eksternal. Selanjutnya, tahap interpretasi digunakan untuk menafsirkan fakta sejarah secara kontekstual dengan mempertimbangkan perspektif gender dan kolonialisme. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan secara logis dan ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap persoalan historis yang bersifat struktural sekaligus ideologis. Kajian pustaka

memungkinkan peneliti menggali berbagai perspektif terhadap fenomena Fujinkai, serta menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran perempuan dalam ruang kolonial yang kompleks.

PEMBAHASAN

FUJINKAI SEBAGAI INSTRUMEN MOBILISASI JEPANG

Pendudukan Jepang di Indonesia sejak tahun 1942 menandai perubahan besar dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial, terutama di Jawa sebagai pusat administratif dan militer Jepang. Pada masa ini, krisis ekonomi yang telah berakar sejak akhir kekuasaan kolonial Belanda kian memburuk akibat sistem ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang. Di bawah konsep "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya," Jepang berusaha mengeksploitasi sumber daya lokal untuk mendukung upaya perangnya. Oleh karena itu, mobilisasi tenaga rakyat, termasuk perempuan, menjadi sangat penting.

Ekonomi perang Jepang dicirikan oleh kontrol ketat atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Tanaman strategis seperti kina, karet, dan bahan tambang didorong produksinya, sedangkan tanaman komersial seperti teh dan kopi digantikan oleh tanaman pangan yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan perang (Daradjati, 2023). Dalam konteks ini, organisasi massa seperti Djawa Hokokai dan Fujinkai menjadi perpanjangan tangan pemerintah militer Jepang dalam menggerakkan rakyat.

Fujinkai, sebagai organisasi perempuan, dibentuk secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah dengan tujuan utama mendayagunakan perempuan dalam membantu kebutuhan perang dan mendukung propaganda Jepang. Keanggotaan Fujinkai diwajibkan bagi perempuan usia 15 tahun ke atas, termasuk istri pejabat, pegawai negeri, dan perempuan dari berbagai latar belakang. Para anggotanya terlibat dalam berbagai aktivitas seperti pelatihan keputrian, pendidikan bahasa Jepang, kesehatan, dan

produksi barang kebutuhan militer (Aditia et al., 2022). Sebelum Fujinkai dibentuk, Jepang telah mencoba menggalang dukungan perempuan melalui Barisan Istri Tiga A di bawah pimpinan Ny. Artinah Samsudin. Namun, gerakan ini gagal menarik simpati rakyat karena terlalu sarat dengan kepentingan propaganda (Daradjati, 2023). Kemudian dibentuklah PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) dan Barisan Pekerja Putera bagian perempuan yang di antaranya bertugas memproduksi kebutuhan militer seperti kaos kaki bagi tentara Jepang.

Jepang juga aktif menyebarkan propaganda melalui lembaga khusus seperti Sendenbu yang didirikan pada tahun 1942. Media dan kegiatan kesenian dimanfaatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai budaya Jepang, mempromosikan peran istri ideal ala Jepang, serta memperkuat citra perempuan sebagai pendukung garis belakang perang (Rosalini & Prianti, 2022).

Dalam perkembangan selanjutnya, Fujinkai menjadi alat penting dalam konsolidasi militer dan politik Jepang. Misalnya, setelah pengumuman janji kemerdekaan Indonesia oleh Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944, Fujinkai menggelar rapat besar di Taman Raden Saleh untuk menyambut pengumuman tersebut. Mereka juga menyebarkan informasi kepada rakyat dan menunjukkan kesiapan untuk mendukung kemerdekaan yang dijanjikan, meskipun tetap berada dalam kendali Jepang (Pratiwi, n.d.).

Dengan demikian, Fujinkai bukan sekadar organisasi sosial, melainkan instrumen kontrol negara pendudukan yang dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi Jepang atas rakyat Indonesia, khususnya perempuan.

PEREMPUAN SEBAGAI AGEN SOSIAL DALAM FUJINKAI

Peran perempuan dalam organisasi Fujinkai selama periode pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebuah fenomena yang

kompleks dan seringkali disalah pahami. Sekilas, organisasi ini dapat dilihat sebagai alat efisien bagi Jepang untuk memobilisasi sumber daya dan dukungan perempuan demi kepentingan perang dan ideologi mereka. Namun, pandangan ini cenderung mereduksi perempuan menjadi entitas pasif, mengabaikan nuansa agensi dan resistensi dalam bentuk-bentuk yang tidak selalu terbuka. Sejarah mencatat bahwa meskipun berada di bawah kerangka yang dipaksakan, perempuan dalam Fujinkai secara aktif terlibat, mempengaruhi perubahan peran mereka, dan bahkan menemukan celah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang melampaui agenda kolonial. Mereka bukan sekadar boneka, melainkan subjek yang bernegosiasi dengan kondisi opresif, mencari ruang untuk eksistensi dan pengaruh.

Keterlibatan perempuan dalam Fujinkai bersifat multifaset dan jauh lebih dari sekadar kepatuhan buta. Jepang memang membentuk Fujinkai dengan tujuan pragmatis: menggalang dukungan finansial, menyelenggarakan kursus kerajinan untuk mendukung ekonomi perang, mengedukasi tentang sanitasi dan kesehatan demi menjaga produktivitas, serta menyebarkan propaganda anti-Sekutu. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, perempuan Indonesia justru menemukan kesempatan yang mungkin tidak akan mereka dapatkan dalam tatanan sosial tradisional. Mereka berinteraksi dengan sesama perempuan dari berbagai latar belakang, membangun jaringan sosial yang melampaui batas desa atau keluarga. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, merajut, atau memasak, meskipun diarahkan untuk tujuan perang, secara intrinsik meningkatkan kapabilitas individu. Sejarawan (Stoler, 2002), dalam analisisnya mengenai kolonialisme dan agensi, mencatat bahwa: "Bahkan dalam kondisi penindasan yang paling parah, subaltern seringkali menemukan cara untuk melakukan adaptasi dan membentuk identitas baru melalui partisipasi yang tidak terduga." Keterlibatan ini membuka wawasan, memperluas

cakrawala pengetahuan praktis, dan pada akhirnya, memberdayakan perempuan secara tidak langsung.

Pengaruh terhadap Perubahan Peran, Dari Ranah Domestik ke Publik, Dampak paling signifikan dari keterlibatan perempuan dalam Fujinkai adalah pergeseran peran mereka dari ranah domestik ke ranah publik. Sebelum pendudukan Jepang, peran perempuan Indonesia sebagian besar terkurung dalam lingkungan rumah tangga, dengan fokus pada urusan keluarga dan reproduksi. Fujinkai secara paksa mendorong mereka untuk keluar dari batasan ini dan terlibat dalam aktivitas di luar rumah. Perempuan mengikuti rapat, menyelenggarakan acara penggalangan dana, melakukan penyuluhan di masyarakat, dan bahkan terlibat dalam kegiatan fisik seperti latihan baris-berbaris atau bercocok tanam kolektif untuk mendukung produksi pangan. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun di bawah kendali Jepang, memberikan mereka pengalaman berorganisasi, kemampuan berbicara di depan umum, dan kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan di tingkat lokal. (Blackburn, 2004), seorang ahli sejarah perempuan Indonesia, berpendapat bahwa: "Meskipun motif awal Jepang adalah eksploitasi, keterlibatan perempuan dalam organisasi seperti Fujinkai tanpa disadari membentuk fondasi bagi partisipasi politik dan sosial mereka di masa depan." Pengalaman ini menjadi semacam "sekolah" informal yang membekali perempuan dengan keterampilan dan kepercayaan diri untuk terlibat lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat pascakemerdekaan.

Meskipun struktur Fujinkai adalah hirarkis dan dikendalikan oleh otoritas Jepang, bukan berarti perempuan tidak memiliki ruang sama sekali untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Artikulasi ini jarang berbentuk perlawanan terbuka, melainkan lebih sering berupa resistensi halus atau negosiasi terselubung. Perempuan menggunakan saluran internal organisasi untuk menyampaikan kebutuhan dan

permasalahan komunitas mereka. Contohnya, mereka mungkin mengajukan permohonan untuk tambahan jatah makanan karena kelaparan di desa mereka, meminta fasilitas kesehatan yang lebih memadai untuk ibu dan anak, atau bahkan menyuarakan kesulitan dalam mengikuti kegiatan yang terlalu memberatkan. Permintaan-permintaan ini seringkali dibungkus dalam narasi kepatuhan dan kesetiaan terhadap tujuan Jepang, namun esensinya adalah penyampaian kepentingan lokal yang mendesak. (Suryakusuma, 2004), dalam analisisnya tentang dinamika kekuasaan, menyoroti bagaimana: "Subjek yang tertindas seringkali mengembangkan strategi licik untuk menyuarakan ketidakpuasan atau memenuhi kebutuhan mereka tanpa secara langsung menentang kekuasaan yang dominan." Ruang ini menunjukkan bahwa meskipun terbatas, agensi perempuan tetap hidup, memanfaatkannya untuk sedikit meringankan beban atau memperbaiki kondisi di lingkungan mereka, bahkan dalam konteks yang paling menantang sekalipun.

DINAMIKA RESISTENSI DAN ADAPTASI

Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 menciptakan dinamika kompleks dalam perjuangan perempuan Indonesia. Dalam tekanan rezim militer dan propaganda kekaisaran, perempuan tidak bersikap tunggal. Mereka menempuh dua pendekatan utama dalam merespons kekuasaan Jepang, yaitu melalui sikap nonkolaboratif dan kolaboratif. Pendekatan nonkolaboratif dipilih oleh sejumlah tokoh yang menolak bekerja sama dengan pemerintah pendudukan. Mereka menilai Jepang sebagai penjajah yang tidak berbeda dari Belanda, dan karena itu tidak memberikan legitimasi terhadap program-programnya. Suzanna Hamdani, salah satu pemimpin organisasi Istri Sedar, secara tegas menolak terlibat dalam aktivitas militer maupun kerja sama resmi. Ia menilai bahwa sikap totaliter Jepang sangat membatasi ruang gerak politik dan

sosial, sehingga memilih untuk tidak menonjolkan diri, meskipun tetap aktif menjalin komunikasi dengan kawan-kawan seperjuangan demi menjaga semangat kolektif (Hardi, 1981, hlm. 211). Sikap diam ini bukan bentuk apatisme, melainkan bentuk resistensi pasif yang tetap berpijak pada semangat perjuangan.

Beberapa tokoh lainnya menyalurkan perlawanan melalui aksi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Johanna Masdani, bersama suaminya, mendirikan sekolah keterampilan menjahit dan merajut bagi remaja. Sekolah ini tidak hanya menjadi sarana pelatihan kerja, tetapi juga menjadi ruang produktif untuk mendukung kesejahteraan rakyat kecil yang mengalami tekanan ekonomi akibat perang. Ia menyatakan bahwa usaha ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi beban derita masyarakat (Hardi, 1981, hlm. 123). Sementara itu, bentuk perlawanan yang lebih langsung ditunjukkan oleh Siti Larang Sosrokardono. Ia aktif dalam rapat-rapat rahasia yang bertujuan menyusun taktik gerakan bawah tanah. Namun aktivitasnya terendus oleh Kempeitai yang kemudian menangkap dan memenjarakannya di Kalisosok dengan tuduhan ikut berperan dalam gerakan antifasis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pilihan untuk menolak Jepang tidak selalu dapat dilakukan secara terbuka, dan justru membawa risiko besar bagi para pelakunya (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1984).

Berbeda dengan sikap penolakan tersebut, sebagian perempuan memilih jalur kolaborasi. Pilihan ini bukan didasarkan pada kepatuhan, melainkan sebagai bentuk strategi adaptif dalam situasi yang sangat terbatas. Djatmani Suparta adalah salah satu tokoh yang menerima kerja sama dengan Jepang, bukan karena percaya pada janji kemerdekaan yang diusung Jepang, tetapi karena ia menyadari bahwa dalam kondisi terdesak, hanya terdapat satu opsi yaitu memanfaatkan peluang dengan optimal untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keterampilan Masyarakat. Ia

percaya bahwa pengorbanan dalam bentuk kerja sama yang penuh perhitungan akan membawa dampak jangka panjang terhadap kesiapan bangsa menuju kemerdekaan. Kolaborasi ini menjadi ruang taktis yang dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat, meningkatkan solidaritas, dan memperluas jaringan gerakan nasionalis (SK Trimurti, 1943a).

Organisasi perempuan seperti Fujinkai menjadi salah satu wadah yang ambigu tetapi strategis. Meskipun dikendalikan langsung oleh Jepang, struktur organisasinya memungkinkan perempuan dari berbagai latar belakang sosial untuk merasakan hidup berorganisasi. Menurut Sukptinah Soenaryo, keberadaan organisasi ini justru memungkinkan perempuan priyayi tidak lagi hidup terasing dari rakyat sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Aktivitas Fujinkai yang mencakup isu kesehatan, pangan, pendidikan, dan keterampilan dijadikan sebagai medium untuk menjawab kebutuhan praktis masyarakat sekaligus memperkuat peran sosial perempuan. Dalam pidatonya di Permusyawaratan Fujinkai se-Jawa dan Madura, Sukptinah menyatakan bahwa perempuan merupakan sayap kiri laki-laki dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Nyi Sri Mangunsarkoro, 1944). Rumah tangga bahkan digambarkan sebagai arena pertahanan garis belakang, di mana perempuan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga sekaligus stabilitas sosial.

Retorika peran domestik yang digencarkan Jepang dimanfaatkan oleh para pemimpin perempuan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai ibu bukan hanya tugas biologis, tetapi juga memiliki dampak politik dan sosial. Dalam media cetak seperti Asia Raya, perempuan digambarkan sebagai sumber kehidupan dan kekuatan moral masyarakat yang mampu memperbaiki kondisi krisis melalui perannya di institusi keluarga. Pemikiran ini juga ditegaskan oleh Maria Ulfah yang dalam artikelnya di Djawa

Baroe menyatakan bahwa pengakuan setara antara perempuan dan laki-laki merupakan syarat mutlak bagi pembangunan masyarakat baru (SK Trimurti, 1943b). Pertemuan-pertemuan besar yang diselenggarakan Fujinkai di Jakarta menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi kolektif perempuan. R.A. Abdurrachman menyampaikan bahwa perempuan Indonesia belum merasa puas sebelum dapat terlibat secara aktif dalam menyelenggarakan rapat-rapat kemerdekaan (Nyi Sri Mangunsarkoro, 1944).

Dari uraian tersebut tampak bahwa baik resistensi maupun adaptasi, keduanya merupakan ekspresi perjuangan yang sama-sama berakar pada semangat kemerdekaan. Mobilisasi perempuan oleh Jepang, yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat rezim kolonial, pada akhirnya menjadi bumerang karena justru memperkuat kesadaran kolektif perempuan Indonesia terhadap pentingnya kemandirian dan kebangsaan. Para pemimpin perempuan mampu menggunakan struktur-struktur Jepang seperti Fujinkai untuk memperluas ruang gerak, memperjuangkan perbaikan sosial, dan memperkuat fondasi menuju kemerdekaan Indonesia.

TRANSFORMASI KADER FUJINKAI

Fujinkai, organisasi perempuan bentukan Jepang, berperan besar dalam memobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung kepentingan militer Jepang, termasuk melalui kerja sosial, pendidikan, dan pelatihan kedisiplinan. Setelah kemerdekaan, status mantan kader Fujinkai menjadi ambigu. Di satu sisi, mereka memiliki pengalaman organisasi dan pelatihan kedisiplinan; namun di sisi lain, keterkaitan mereka dengan rezim pendudukan membuat mereka dicurigai, terutama di masa awal pascakemerdekaan yang sangat sensitif terhadap kolaborasi dengan penjajah. Situasi ini memengaruhi posisi sosial dan politik mereka dalam masyarakat baru Indonesia yang tengah membangun ulang identitas nasional dan struktur kelembagaan.

a. Transformasi Sosial dan Politik Mantan Anggota Fujinkai

Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, organisasi-organisasi resmi Jepang dibubarkan, termasuk Fujinkai. Para anggotanya menghadapi pilihan sulit: kembali ke kehidupan domestik atau melanjutkan kiprah di ruang publik yang kini dikendalikan oleh kekuatan nasionalis. Beberapa mantan anggota Fujinkai menggunakan pengalaman organisasional mereka untuk bergabung dengan organisasi perempuan pascakemerdekaan seperti Perwari dan Gerwani. Mereka membawa keterampilan administratif, jaringan sosial, dan semangat kolektivisme yang terbentuk selama masa pendudukan (Pohlman, 2018; Ohorella et al., 1992).

Namun demikian, transformasi ini tidak selalu berjalan mulus. Sebagian besar masyarakat masih mencurigai keterlibatan mereka dengan Jepang, mengingat Fujinkai dipandang sebagai alat mobilisasi kolonial. Oleh sebab itu, beberapa eks-kader mengalami pengucilan sosial di lingkungannya atau diabaikan oleh organisasi-organisasi perempuan nasional yang lebih “ideologis” dan anti-kolonial (Wulandari, 2017). Stigma ini memperlemah posisi tawar mereka dalam dunia politik dan sosial pascakemerdekaan.

Meskipun demikian, di masa Orde Lama, terutama saat demokrasi terpimpin Soekarno, keterlibatan perempuan dalam berbagai organisasi cukup terbuka. Dalam konteks ini, sejumlah mantan anggota Fujinkai dapat menyamakan latar belakang masa lalu mereka dan berintegrasi dalam organisasi baru, termasuk yang berafiliasi dengan partai politik seperti Gerwani yang kala itu sangat aktif dalam memajukan isu-isu perempuan seperti penghapusan buta huruf dan reformasi hukum perkawinan (Pohlman, 2018; Ohorella et al., 1992). Namun gelombang Orde Baru membawa arus balik. Pemerintah membatasi aktivitas organisasi perempuan independen dan menggantikannya

dengan organisasi resmi seperti Dharma Wanita. Perempuan kembali didomestikasi, dan setiap keterlibatan politik masa lalu yang terkait dengan organisasi kiri atau Jepang menjadi beban. Banyak eks-Fujinkai mengalami marginalisasi struktural, tidak hanya karena sejarah mereka di masa Jepang, tetapi juga karena sebagian di antaranya kemudian diasosiasikan dengan organisasi progresif seperti Gerwani (Wirahmat & Alfayani, 2022).

Transformasi sosial-politik mantan anggota Fujinkai sangat ditentukan oleh konteks zaman. Pada masa demokrasi liberal dan awal Orde Lama, peluang berkiprah masih terbuka. Namun, semakin menguatnya otoritarianisme dan rekonsolidasi narasi sejarah versi negara membuat sebagian besar eks-Fujinkai tersingkir dari catatan resmi pergerakan perempuan Indonesia.

b. Peran dan Posisi Mantan Kader dalam Gerakan Perempuan Nasional: Antara Partisipasi dan Marginalisasi

Setelah kemerdekaan, sejumlah organisasi perempuan nasional mulai bermunculan dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara lebih terbuka. Dalam situasi ini, sebagian kecil mantan anggota Fujinkai berhasil mentransformasi diri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan perempuan. Pengalaman organisasi selama di Fujinkai memberi mereka bekal kepemimpinan dan kemampuan administratif. Mereka bergabung dalam organisasi seperti Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) atau Isteri Sedar yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan partisipasi politik perempuan (Astuti et al., 2022).

Namun partisipasi ini tidak selalu diterima secara luas. Banyak organisasi perempuan yang berhaluan nasionalis atau berafiliasi dengan partai tertentu mempertanyakan loyalitas kader dengan latar belakang Fujinkai. Mereka dianggap sebagai “produk kolonial” atau “kolaborator”, meskipun kontribusi mereka dalam organisasi pascakemerdekaan cukup signifikan. Ini menciptakan segregasi internal dalam gerakan

perempuan sendiri, antara mereka yang “asli” nasionalis dan mereka yang memiliki sejarah ambivalen (Wulandari, 2017).

Lebih jauh lagi, narasi sejarah yang dikembangkan oleh negara, khususnya pada masa Orde Baru, turut mempersempit ruang gerak perempuan dengan latar belakang seperti itu. Pemerintah mengedepankan model perempuan ideal versi Dharma Wanita setia pada negara dan suami—serta mengaburkan keberagaman identitas sejarah perempuan. Dalam kerangka ini, tidak ada tempat bagi narasi eks-Fujinkai, apalagi yang pernah berhubungan dengan gerakan perempuan progresif seperti Gerwani (Pohlman, 2018; Wirahmat & Alfiyani, 2022).

Meski demikian, ada pula tokoh-tokoh perempuan yang berhasil keluar dari stigma ini dan membangun kembali reputasinya. Mereka memilih jalur pendidikan, sosial, atau keagamaan untuk melanjutkan perjuangan, jauh dari kancah politik nasional. Transformasi mereka ini tidak selalu tercatat dalam sejarah resmi, tetapi tetap berkontribusi dalam upaya pemberdayaan perempuan di tingkat lokal (Wulandari, 2017).

Fenomena marginalisasi dan partisipasi ini menunjukkan bahwa sejarah gerakan perempuan di Indonesia tidak pernah tunggal. Ia terdiri dari berbagai spektrum identitas, termasuk mereka yang pernah menjadi bagian dari struktur kolonial, tetapi kemudian bertransformasi sesuai konteks zamannya. Mereka bukan semata korban sejarah, melainkan juga pelaku yang aktif menegosiasikan peran dan eksistensinya dalam ruang sosial-politik baru Indonesia merdeka.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Fujinkai, meskipun merupakan alat mobilisasi Jepang yang bersifat koersif dan propagandistik, justru membuka ruang baru bagi perempuan Indonesia untuk terlibat dalam kehidupan publik. Melalui organisasi ini, perempuan tidak hanya dilibatkan dalam

kegiatan domestik dan sosial, tetapi juga memperoleh pelatihan keterampilan, pengalaman berorganisasi, serta peluang untuk memperluas jaringan sosial lintas kelas. Di balik struktur organisasi yang hierarkis dan dikendalikan oleh Jepang, perempuan Indonesia membentuk agensi tersendiri melalui negosiasi halus, strategi adaptasi, dan bahkan resistensi simbolik terhadap dominasi kolonial.

Partisipasi perempuan dalam Fujinkai turut menggeser peran mereka dari ranah domestik ke ranah publik, memberikan dasar bagi keterlibatan yang lebih luas dalam gerakan perempuan pascakemerdekaan. Beberapa mantan kader Fujinkai mampu mentransformasikan pengalaman mereka ke dalam aktivitas organisasi perempuan nasional seperti Perwari dan Gerwani, meskipun tidak sedikit pula yang mengalami marginalisasi karena stigma sebagai kolaborator penjajah. Hal ini mencerminkan bahwa sejarah gerakan perempuan di Indonesia tidaklah tunggal, melainkan penuh kompleksitas dan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, ideologi, serta narasi yang dominan pada tiap masa.

Dengan demikian, Fujinkai tidak hanya perlu dilihat sebagai alat politik Jepang, tetapi juga sebagai arena sosial tempat perempuan Indonesia membangun kapasitas, memperjuangkan kepentingan komunitas, dan menyumbang pada proses transformasi sosial. Temuan ini memperkaya historiografi perempuan Indonesia dengan menyoroti bahwa perjuangan tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka, melainkan juga melalui strategi bertahan dan artikulasi peran dalam ruang-ruang yang dibatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, D., Lestari, E. S., Adelia, D. N., Arif, S., & Perdana, Y. (2022). Gerakan feminisme Fujinkai dalam perspektif sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(1).
- Astuti, R., Salsabhila, F. W., Zamasi, R. serasi, Kuncoro, M. bagus A., & Syifa, A. N.

- (2022). Peran Perempuan Dalam Pergerakan Nasional Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Generasi Pancasila, 2, 37–40. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/gnp/article/view/46734>
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Daradjati, K. P. (2023). Bersiasat melawan saudara tua: Mobilisasi dan resistensi perempuan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. *Lembaran Sejarah*, 19(1).
- Hardi, Lasmidjah (1981). *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran* buku I- V. Jakarta: Yayasan Wanita Pejoang.
- Kratoska, P. H. (2005). *Asian Labour in the Japanese Empire*. Routledge.
- Kuntowijoyo. (2008). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Nyi Sri Mangunsarkoro “Pengaroeh Ketegoehan Watak Iboe kepada Masyarakat”. *Asia Raya*, 15 Januari 1944.
- Ohorella, G. A., Sutjiatiningsih, S., & Ibrahim, M. taruddin. (1992). *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pohlman, A. (2018). Women and Nationalism in Indonesia. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i1.12114>
- Pratiwi, F. M. (n.d.). Pemberdayaan perempuan oleh rezim militer Jepang dalam surat kabar Asia Raya 1942–1945. [Jenis publikasi tidak disebutkan].
- Rosalini, R. H., & Prianti, D. D. (2022). Propaganda Jepang di Indonesia melalui majalah Djawa Baroe pada masa kependudukan 1943. *Jurnal Komunikasi*, 16(2).
- SK Trimurti “Wanita diwaktue Perang”. *Pembangoen*, 2 Desember 1943. *Djawa baroe*, 1 Februari 1943.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1984). *Perjuangan wanita 10 windu setelah Kartini: 1901–1984*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Wirahmat, H., & Alfiani, N. (2022). Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 114–131. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.463>
- Wulandari, T. (2017). *Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.